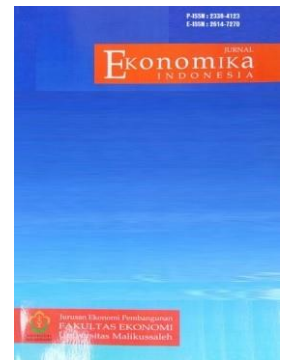


PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KECENDERUNGAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

*^aNur Afni Yunita *^bMuhammad Yusra *^cRany Gesta Putri Rais

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Corresponding author: nurafni.yunita@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Keywords:

Information Asymmetry; Internal Control; Organizational Commitment; Competence; Cheating Tendencies.

This research aims to determine the influence of information asymmetry, internal control, organizational commitment, and competence to the tendency of fraud in village financial management in Lhokseumawe City Government. The study used primary data in the form of questionnaires. The data analysis methods used are instrument tests and classical assumption tests as well as multiple linear regression tests using the help of SPSS version 26 software. The results of the partial test obtained that information asymmetry and competence had a positive but insignificant effect on the tendency of fraud in the financial management of the village in Lhokseumawe city government. Meanwhile, internal control has a negative but insignificant effect on the tendency of fraud in the management of village funds in Lhokseumawe city government, while organizational commitment negatively affects the tendency of fraud in village financial management in Lhokseumawe city government.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, kecenderungan *fraud* menjadi sebuah hal yang sangat sering dijumpai dan menjadi sebuah isu yang sangat menarik untuk dibicarakan. *Fraud* tidak hanya terjadi pada perusahaan, bahkan *fraud* juga sangat banyak terjadi di sektor pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya kasus-kasus korupsi pejabat pemerintah yang tersebar di berbagai media massa sehingga *fraud* akuntansi bukan menjadi sebuah rahasia lagi.

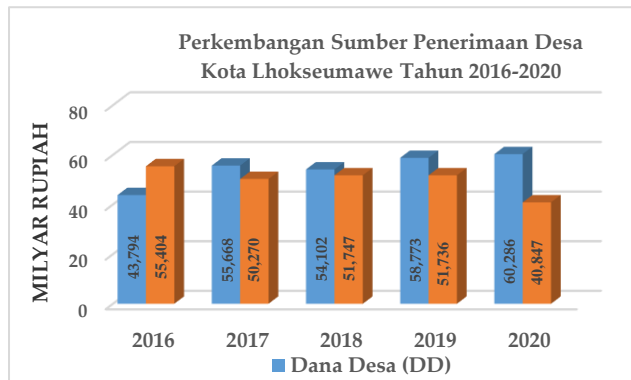
Menurut berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com pada 22 Maret 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyusul temuan tentang maraknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat dari perangkat desa. Berdasarkan data ICW sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat 676 kasus korupsi dari perangkat desa. Bahkan, menurut Kurnia Ramadhan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparat desa mencapai total 111 miliar rupiah. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020 setelah praktek korupsi yang dilakukan oleh Klaster Politik yakni anggota legislatif dan kepala desa sebesar 115 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam pidato Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada 21 November 2020.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adalah adanya asimetri informasi dimana asimetri informasi merupakan tidak

seimbangannya informasi yang diperoleh oleh pihak dalam aparat desa dengan pihak yang diluar aparat desa. Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adalah lemahnya pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu desa. Pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu prosedur yang dilaksanakan oleh para aparat dalam sebuah desa, di mana jika prosedur yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai, maka kemungkinan besar dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* terhadap pengelolaan keuangan desa. Komitmen organisasi juga dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, hal tersebut dikarenakan jika para aparat desa tidak memiliki komitmen terhadap desa, maka peluang terjadinya *fraud* sangat tinggi. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya tingkat kompetensi yang dimiliki oleh para aparat desa, dimana jika seorang aparat desa tidak memiliki kompetensi yang tinggi, maka tingkat kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa akan meningkat.

Kota Lhokseumawe merupakan kota yang memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Satu, Muara dua, Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah desa sebanyak 68 desa. Penerimaan yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kota Lhokseumawe mencapai angka miliaran rupiah dan nilainya semakin meningkat setiap tahunnya. Dana Desa pada tahun 2016 di Kota Lhokseumawe sebesar Rp 43.793.965.000,00, meningkat menjadi Rp 60.285.819.000,00 pada tahun 2020. Sementara itu, Alokasi Dana Gampong (ADG) Kota

Lhokseumawe pada tahun 2016 sebesar Rp 55.403.995.900,00 menurun menjadi Rp40.846.685.523,00 pada tahun 2020. Lebih lengkapnya perkembangan DD dan ADG di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari gambar 1 berikut ini:



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), 2021

Gambar 1. Perkembangan Sumber Penerimaan Desa di Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020

Kecenderungan terjadinya *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kota Lhokseumawe terlihat dari beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi. Terdapat beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Lhokseumawe seperti di Desa Ujong Pacu, Hagu Teungoh, Desa Tunong, dan kasus lainnya. Adapun beberapa kasus korupsi di Kota Lhokseumawe adalah seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kasus Korupsi di Kota Lhokseumawe

No	Terdakwa	Desa	Kecamatan	Tahun	Jumlah Korupsi
1	Muslem Hasballah dan Edi Saputra	Ujong Pacu	Muara Satu	2021	Rp 360.000.000,-
2	Mustaqim Bin Abdullah Nur	Tunong	Blang Mangat	2017	Rp 243.000.000,-
3	Imran Bin M. Yasin	Hagu Teungoh	Banda Sakti	2016	Rp 124.120.145,-
4	Nasril Bin M. Nur Abbas	Keude Aceh	Banda Sakti	2015	Rp 121.045.421,-

Dari beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Lhokseumawe tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa apa yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Menyikapi fenomena tersebut penting dilakukan suatu penelitian.

KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan semua kegiatan yang telah dilakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan sebagian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Fraud

Menurut *Statement of Auditing Standards* No. 99, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. Irphani (2017) menjelaskan bahwa *fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah tindakan korupsi, bentuk korupsi dalam pemerintahan ataupun desa terdiri dari korupsi keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Simanjuntak (2011) mengemukakan bahwa kecenderungan *fraud* akuntansi di sektor pemerintahan menjadi problematika yang menjadi pusat perhatian sebagai dinamika yang sering terjadi. Salah satu ciri terdapat kecenderungan *fraud* di pemerintahan adalah ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan yang disengaja, di mana tindakan tersebut bertujuan untuk berbuat curang seperti memanipulasi, mark up, dan penyalahgunaan aset pemerintah maupun korupsi.

Asimetri Informasi

Saftarini, dkk (2015) mengemukakan asimetri informasi dalam pemerintahan adalah kondisi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara informasi yang dibutuhkan oleh kepala daerah atau kepala negara dengan bawahannya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

Menurut Bastian (2010:7) sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

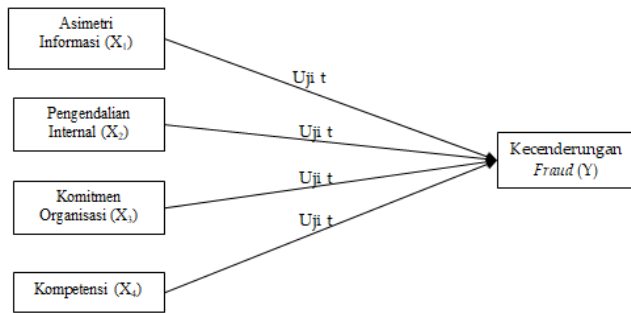
Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan cerminan di mana seorang karyawan dalam mengenali organisasi dan terikat kepada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang memiliki komitmen diharapkan dapat menunjukkan ketersediaannya untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja disuatu perusahaan (Kreitner & Kinicki, 2011).

Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting (Purwaji, dkk, 2018).

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Adapun perumusan hipotesis yang akan peneliti teliti yakni:

- H₁ : Diduga Asimetri Informasi berpengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan *fraud*.
 H₂ : Diduga Pengendalian Internal berpengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan *fraud*.
 H₃ : Diduga Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan *fraud*.
 H₄ : Diduga Kompetensi Organisasi berpengaruh signifikan Terhadap Kecenderungan *fraud*.

METODE ANALISIS DATA

Lokasi dan Objek Penelitian

Target atau Objek yang akan diteliti nantinya yaitu Objek penelitian ini berkaitan dengan asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi, dan kecenderungan *fraud*. Dengan lokasi penelitian desa-desa dibawah pemerintahan Kota Lhokseumawe. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kota Lhokseumawe yaitu sebanyak 68 desa yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* atau lebih tepatnya *purposive sampling*. jumlah desa yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 desa dengan kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti yaitu pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari kepala desa (keuchik), sekretaris desa (sekdes) dan kaur keuangan dengan jumlah responden sebanyak 96 responden.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada para aparatur desa di Kota Lhokseumawe. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dan dependen. Analisis ini diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 26. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji statistik, pengujian statistik dilakukan untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

Definisi operasional variabel

- Fraud* diukur melalui Manipulasi Catatan Akuntansi; Representasi yang salah; Salah penerapan secara sengaja; Penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian; Penyajian laporan keuangan yang

salah akibat perlakuan yang tidak semestinya.

- Asimetri Informasi diukur melalui Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan; Hubungan input- output yang ada dalam operasi internal; Kinerja potensial; Teknis pekerjaan; Mampu menilai dampak potensia.
- Pengendalian Internal diukur melalui Lingkungan pengendalian; Penaksiran risiko; Aktivitas pengendalian; Informasi dan komunikasi; Pemantauan
- Komitmen Organisasi diukur melalui Kemauan karyawan; Kesetiaan karyawan; Kebanggaan karyawan
- Kompetensi diukur melalui Pengetahuan; Pemahaman; Kemampuan atau keterampilan; Nilai; Sikap; Minat

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik harus bebas dari masalah asumsi klasik. Ghazali (2016) Tujuan pengujian asumsi klasik ada untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Model regresi ini dipilih karena penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan empat variabel independen yang berarti variabel independen pada penelitian ini lebih dari satu. Model analisis berganda ini dipakai sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable dependent terhadap variabel independen, apabila pengaruh dari variabel-variabel lainnya tetap atau konstan (Sugiyono, 2010).

Uji T

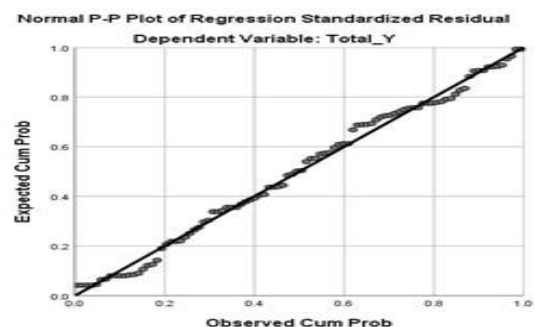
Uji dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh tiap variabel terikat terhadap variabel sehingga hasil yang akan didapatkan akan sesuai dengan data yang akan digunakan. Untuk cara membaca tabelnya sudah terlampirkan diatas. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang pengaruh variabel terikatnya signifikan terhadap variabel bebasnya baik itu bersifat positif maupun negative.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau R² yaitu untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar kemampuan model dari pada tiap variabel untuk mempengaruhi variabel dependent atau variabel terikatnya. Besarnya nilai koefisiensi determinasi adalah 0 sampai 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 3. Hasil Uji Normality

Ketentuan grafik *normality probability plot* dapat dilihat jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau titik data yang berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018). Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik *normality probability plot* data di dalam penelitian ini bersifat normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2 sbb:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Diagnostic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Asimetri Informasi	0.972	1.029	Bebas Multikolinearitas
Pengendalian Internal	0.783	1.278	Bebas Multikolinearitas
Komitmen Organisasi	0.808	1.238	Bebas Multikolinearitas
Kompetensi	0.808	1.237	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data diolah (2021)

Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah seperti pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
Asimetri Informasi	0.209	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas
Pengendalian Internal	0.373	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi	0.113	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas
Kompetensi	0.073	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (2021)

Pengujian Hipotesis Uji

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4 sbb:

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	24.793	4.512		5.495	0.000
Asimetri Informasi	0.025	0.059	0.039	0.420	0.675
Pengendalian Internal	-0.218	0.131	-0.170	-1.669	0.098
Komitmen Organisasi	-0.441	0.096	0.461	4.583	0.000
Kompetensi	0.246	0.154	0.161	1.601	0.113

Sumber : Data diolah (2021)

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh asimetri informasi, pengendalian internal, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota

Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 24.793 + 0.025 X_1 - 0.218 X_2 - 0.441 X_3 + 0.246 X_4$$

Hasil menunjukkan bahwa variabel Asimetri informasi dan kompetensi memiliki hubungan positif terhadap kecenderungan *fraud*, dimana jika terjadi peningkatan asimetri informasi dan kompetensi menyebabkan kenaikan kecenderungan dilakukan *fraud* pada pengelolaan keuangan dana desa. Sebaliknya untuk variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi memiliki hubungan negatif terhadap kecenderungan dilakukan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Kota Lhokseumawe.

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini didapatkan bahwa Hasil signifikansi untuk variabel Asimetri Informasi (H_1) sebesar 0.675 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05 ($0.675 > 0.05$) dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 1.98498 ($0.420 < 1.98498$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Varibel Pengendalian Internal (H_2) didapatkan hasil bahwa 0.098 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05 ($0.098 > 0.05$) dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 1.98498 ($-1.669 < 1.98498$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

variabel komitmen organisasi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 1.98498 ($4.583 > 1.98498$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Sedangkan untuk variabel kompetensi sebesar 0.113 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05 ($0.113 > 0.05$) dan nilai thitung lebih kecil dari tabel yaitu 1.98498 ($1.601 < 1.98498$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar pengaruh semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Hasil koefisien determinasi (*adjusted R-square*) yang diperoleh adalah sebesar 0.225. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh asimetri informasi, pengendalian internal, komitmen organisasi, dan kompetensi sebesar 22,5%. Sedangkan sisanya 77,5% kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa koefisien determinasi memiliki korelasi yang lemah karena berada pada korelasi 0.1–0.49.

PEMBAHASAN

Pengaruh Asimetri Informasi (X_1) Terhadap Kecenderungan *Fraud* (Y)

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi Asimetri informasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,675 dan secara parsial berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di pemerintah kota Lhokseumawe. Hal tersebut juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 0,420 serta nilai koefisien 0,039 yang artinya Asimetri Informasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Alasan lainnya yang menyebabkan asimetri informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dikarenakan terdapat 43,8% atau 42 responden memberikan jawaban setuju jika hanya pihak pengelola keuangan desa yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe masih adanya asimetri informasi antara para aparatur desa, sehingga tingkat *fraud* dalam pengelolaan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe sangat rentan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Wahyono (2018), dan penelitian yang dilakukan oleh Komala, dkk (2019).

Pengaruh Pengendalian Internal (X₂) Terhadap Kecenderungan *Fraud* (Y)

Dari hasil kajian yang penulis lakukan dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe menemukan bahwa pengendalian internal (H2) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini terlihat dari tabel 5 dimana nilai signifikansi sebesar $0,098 < 0,05$. Hal tersebut juga dibuktikan dengan t hitung sebesar -1,669 serta nilai koefisien -0,170 yang artinya Asimetri Informasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini tersebut juga dapat dilihat dari jawaban responden pada kuisisioner yang menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang memang belum tentu di catat dalam sistem akuntansi.. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya pengawasan dan masih lemahnya pengendalian internal yang dimiliki sehingga hal tersebut tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 pasal 63-64 tentang Gampong yang menyebutkan bahwa Tuha Peut mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan intern terhadap kinerja keuchik dan aparatur desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana APBG, Qanun Gampong, Reusam dan peraturan gampong. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan dari Tuha peut terhadap kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa menyebabkan kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Kota Lhokseumawe terjadi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yulia, dkk (2021) dan Noprianto, dkk (2020).

Pengaruh Komiten Organisasi (X₃) Terhadap Kecenderungan *Fraud* (Y)

Hipotesis ketiga (H3) yaitu : komitmen organisasi (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini terlihat dari tabel 5 dimana

nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Hal tersebut juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 4,583 serta nilai koefisien 0,461 yang artinya Asimetri Informasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil pembagian kuesioner kepada para aparatur desa di Kota Lhokseumawe di mana dalam hal ketersediaan dari para aparatur desa bekerja lembur untuk berhasil dan sukses dalam pengelolaan keuangan desa menemukan bahwa sebanyak 50 responden (52,1%) dari 96 responden memberikan jawaban setuju dan terdapat 24 (25%) dari 96 responden memberikan jawaban sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya komitmen yang dimiliki oleh para aparatur desa dalam mengelola keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Bahkan sebanyak 60,4% memberikan jawaban setuju dan 36,5% aparatur desa memberikan jawaban sangat setuju bahwa mereka sangat peduli dengan nasib desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sumbayak, dkk (2017) dan Widiutami, dkk (2017).

Pengaruh Kompetensi (X₄) Terhadap Kecenderungan *Fraud* (Y)

Berdasarkan hasil kajian penulis di Pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan desa menemukan bahwa kompetensi (H4) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Artinya semakin tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka tidak menutup kemungkinan kecenderungan *fraud* juga akan semakin tinggi. Hal ini terlihat dari tabel 5 dimana nilai signifikansi sebesar $0,113 < 0,05$. Hal tersebut juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 1,601 serta nilai koefisien 0,161 yang artinya Asimetri Informasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Penyebab kompetensi berpengaruh positif disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemampuan kerja setiap aparatur desa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sumber daya kompeten yang aparatur desa peroleh tersebut didapatkan dengan berbagai cara diantaranya adalah melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja dan lain sebagainya. Maka dari itu, tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur desa tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa kecenderungan *fraud* juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Noprianto, dkk (2020) dan Arthana (2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Asimetri informasi secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Pengendalian internal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Hal ini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Pemerintahan Kota Lhokseumawe menemukan bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa yang memang tidak dicatat di sistem akuntansi, masih kurangnya pengawasan intern dan masih lemahnya pengendalian internal yang dimiliki. Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan

desa sedangkan untuk variabel kompetensi didapatkan hasil bahwa Kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Artinya semakin tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur desa, maka tidak menutup kemungkinan kecenderungan *fraud* juga akan semakin tinggi. Penyebab kompetensi berpengaruh positif disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemampuan kerja setiap aparatur desa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak signifikannya kompetensi terhadap kecenderungan *fraud* dikarenakan masih terdapat aparatur desa yang kurang mampu dalam memahami proses kerja berbasis teknologi komputer.

Saran

Bagi pihak aparatur desa supaya lebih memprioritaskan lagi adanya pengendalian internal, kompetensi serta terus meningkatkan keakuratan informasi maupun transparansi dalam mengelola keuangan desa untuk mencegah terjadinya tingkat kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya sebatas dengan variabel asimetri informasi, pengendalian internal, komitmen organisasi, dan kompetensi untuk melihat pengaruhnya terhadap kecenderungan *fraud*. Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Aristia, M., & Putu, G. D. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Lombok Timur). *E-Journal Akuntansi*, 8(2).
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Ket). Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Ket). Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Guritno, Tatang (2021). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Komala, R., Piturungsih, E., & Firmansyah, M. (2019). Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *e-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 645– 657.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noprianto, E., Rahayu, S., & Yudi. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Se-Kecamatan Pelepet Ilir Kabupaten Bungo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 258–267.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Purwaji, A., Wibowo, & Muslim, S. (2018). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, E., & Wahyono. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 233–244.
- Saftarini, P. R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 51–58.
- Simanjuntak. (2011). *Manajemen Evaluasi Kinerja* (Ketiga). Jakarta: Fakultas UI.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 51–58.
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Qanun Kota Lhokseumawe. <http://jdih.lhokseumawekota.go.id/dih/view/2e8a1d56-8f54-46d0-b149-f3fdc9034ed9>
- Sumbayak, J. S., Anisma, Y., & Hasan, M. A. (2017). Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud). *JOM Fekom*, 4(1), 3168–3182.
- Widiutami, N. P. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yulia, F., Anugerah, R., & Azlina, N. (2021). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Feasible*, 3(1), 88–96.